

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan pusat pemerintahan merupakan sebuah wadah berlangsungnya kegiatan politik dan administratif antara pemerintahan dan masyarakat. Selain menjadi wadah berlangsungnya kegiatan tersebut, kawasan pusat pemerintahan berfungsi sebagai pusat dari struktur ruang kota dan dapat dipahami juga sebagai pusat kegiatan dari suatu kota atau wilayah bahkan suatu negara. Salah satu tujuan dari direncanakannya kawasan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dimana hal itu tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sendiri dalam melaksanakannya, (Farid, 2017). Permasalahan yang sering terjadi pada kawasan pusat kota yang juga merupakan kawasan pusat pemerintahan yaitu tidak terciptanya kawasan pusat kota yang kuat dan konsisten. Sedangkan jika dilihat dari sisi pemerintahan, permasalahan yang timbul adalah terjadinya ketidakaturan, ketidakefisienan dan tersendatnya proses kegiatan pemerintahan yang akibatnya berdampak pula terhadap masyarakat yang dilayani pemerintah. Demikian pula dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, kondisi yang ada sekarang pada ibukota pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu belum mempunyai kawasan pemerintahan yang mendukung kegiatan dan aktifitas pemerintahan daerah serta belum tercipta identitas yang kuat sebagai ibukota pemerintahan.

Kawasan pemerintahan sendiri tidak dapat terlepas dari proses perencanaan dan perancangan kotanya. Dalam perwujudannya perancangan tidak boleh lepas dari hirarki atau urutan penerapan kebijaksanaan spasial, (Purba, 2015). Kebijakan spasial adalah untuk mencapai tujuan penataan ruang secara berkesinambungan, namun penerapannya seringkali tidak seperti yang telah ditetapkan. Begitu pula yang terjadi pada perencanaan kawasan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Setelah pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku ditetapkan pada pasal 9 ayat 2 Ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat berkedudukan di Dataran Honipopu dengan ditetapkannya kota Piru sebagai pusat pemerintahan. Pembangunan kawasan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat ditemukan tersebar pada tiga lokasi yaitu lokasi 1 Jl. Kabupaten, Kawasan Kantor Bupati, lokasi 2 Jl. Trans Seram Kawasan Tugu Ina Ama, dan lokasi 3 Jl. Kabaressy Kawasan Kantor Bupati Lama. Persebaran kawasan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat menimbulkan masalah terkait pelayanan pemerintah kepada masyarakat dari sebelas kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang melakukan pengurusan di tiga lokasi sebaran kawasan pemerintahan. Selain itu juga menimbulkan masalah terkait penggunaan lahan dan kesesuaian lahan pada tiga lokasi kawasan pemerintahan dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat No 11 Tahun 2010-2030. Jika dilihat, Ibukota pemerintahan mempunyai fungsi

yang sangat penting, yaitu sebagai pusat pelayanan masyarakat, kegiatan sosial-ekonomi serta politik dan pemerintahan. Dengan demikian, suatu kawasan pemerintahan tentunya harus dapat menunjang terciptanya fungsi kawasan tersebut. Dalam arti lain kawasan pemerintahan juga berfungsi sebagai sarana dan pengolahan sumber daya daerah bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Adanya permasalahan kawasan pemerintahan yang berkaitan dengan tata ruang dan lahan dengan memiliki fungsi kawasan pemerintahan yang sangat penting serta menunjang kegiatan pemerintahan dalam pelayanan bagi masyarakat membuat peneliti tertarik melakukan penelitian untuk diteliti dan diketahui lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh persebaran kawasan pemerintahan, dan bagaimana kesesuaian lahan kawasan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap rencana tata ruang.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, berikut ini pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian:

1. Dampak apa yang timbul akibat persebaran kawasan pemerintahan?
2. Bagaimana evaluasi kesesuaian lahan kawasan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dampak yang muncul akibat persebaran kawasan pemerintahan
2. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian lahan kawasan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu manfaat teoritis, manfaat praktisi dan manfaat bagi peneliti. Manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat perencanaan wilayah dan kota dalam evaluasi kawasan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap rencana tata ruang dan kesesuaian lahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktisi diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- Hasil evaluasi sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah untuk pembangunan kantor-kantor pemerintahan pada satu kawasan.
- Menjadi bahan pengambilan keputusan dalam menentukan perencanaan wilayah kota atau kabupaten untuk pembangunan jangka panjang

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sangat bermanfaat dengan ilmu yang didapat selama perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan di penelitian ini. Berikut manfaat penelitian yang didapat:

- Dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, lebih mendalami tentang evaluasi dan analisis spasial untuk penggunaan lahan.
- Mengetahui tahapan penelitian yang dilakukan selama meneliti, seperti analisis yang digunakan, data yang diperlukan dan proses perizinan, serta penulisan penelitian yang dibuat dengan baik dan benar.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan pada tiga (3) lokasi yaitu Jl. Kabupaten, Kawasan Kantor Bupati, Jl. Trans Seram Kawasan Tugu Ina Ama, dan Jl. Kabaressy, Kawasan Kantor Bupati Lama, yang berada di Desa Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemilihan lokasi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mencakup 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Barat karena penelitian ini berkaitan dengan kawasan pemerintahan Kabupaten. Maka untuk batas wilayahnya sebagai berikut :

Batas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat :

- Sebelah Utara : Laut Seram
- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Barat : Laut Buru
- Sebelah Timur : Kabupaten Maluku Tengah

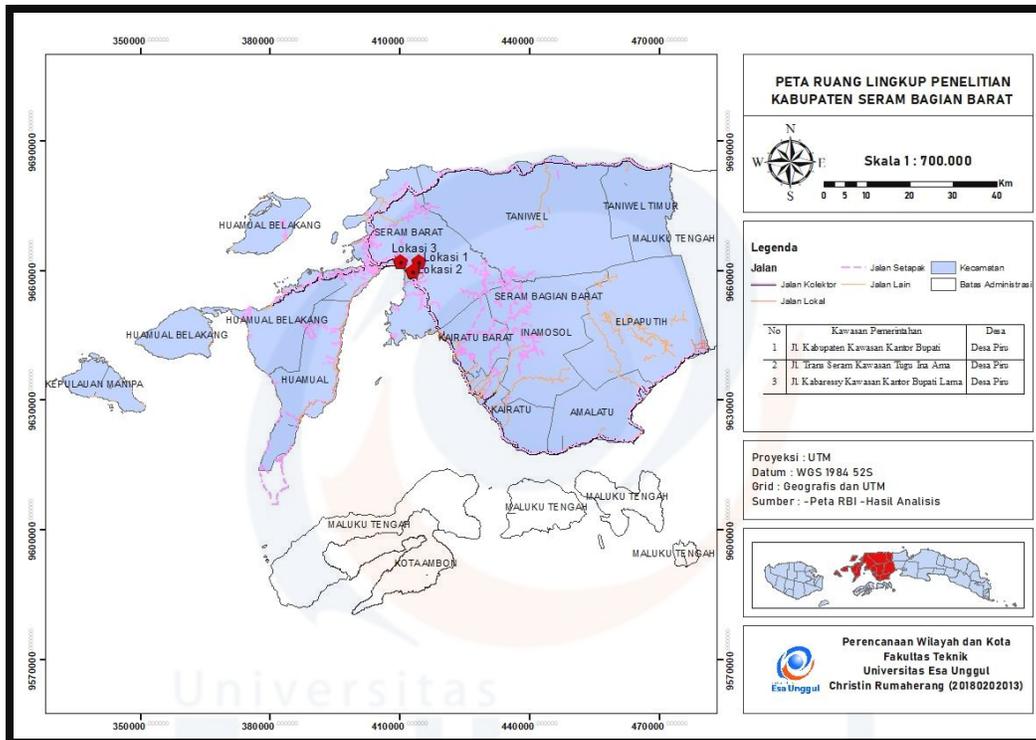
Batas Wilayah Kecamatan Seram Barat dengan kajian studi 3 titik lokasi :

- Sebelah Utara : Kecamatan Taniwel
- Sebelah Timur : Kecamatan Kairatu Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Laut Seram
- Sebelah Barat : Kecamatan Huamual

Tiga lokasi Kawasan Pemerintahan yang berada di Desa Piru batas Wilayah Desa Piru sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Kawa
- Sebelah Timur : Desa Morekau
- Sebelah Selatan : Laut Seram
- Sebelah Barat : Desa Eti

Gambar 1.1 Peta Ruang Lingkup Penelitian



Sumber : Hasil Analisis, 2022

1.5.2 Ruang Lingkup Materi dan Substansi

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, berikut penjabaran ruang lingkup substansinya :

1. Dampak akibat persebaran Kawasan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat difokuskan dampaknya terhadap masyarakat dari 11 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang melakukan aktivitas di tiga lokasi kawasan pemerintahan dengan melihat aksesibilitas yang didalamnya terdapat jarak tempuh, waktu tempuh, kondisi jalan dan moda transportasi.
2. Analisis evaluasi kesesuaian lahan bangunan kawasan pemerintahan untuk menentukan bangunan pemerintahan sudah sesuai dengan peruntukkan yang

telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan evaluasi berdasarkan rencana pola ruang.